# IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUMBER BRANTAS

(Studi Kasus Di Desa Sumber Brantas)

# **SKRIPSI**



Disusun Oleh:
PAULUS PATI JAHA BAKA
NIM: 2018210226

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 2023

#### RINGKASAN

Upaya yang berhasil dan produktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akan ada peningkatan manfaat administrasi atau kepuasan pelanggan bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk memberantas kejahatan. Ini adalah salah satu cara untuk menerapkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah harus diperhatikan dengan seksama dan seksama. Investigasi pelayanan publik sangat penting karena masyarakat biasanya merasa bahwa kehidupan dan pelayanan tidak dapat dipisahkan dan mereka sangat membutuhkan pelayanan publik yang baik. Dalam prosedur investigasi penelitian ini, tiga strategi pertemuan, dokumentasi, dan persepsi digunakan untuk mengumpulkan data dan menggunakan teknik penilaian subjektif. teknik untuk menguji sumber secara sengaja. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi data.

Temuan investigasi tentang bagaimana konsep administrasi prima digunakan untuk memperkuat prinsip-prinsip bantuan publik di Kota Sumber Brantas, Kabupaten Malang. DPRD Kota Sumber Brantas telah menggunakan praktik bahasa yang baik, terutama dalam bentuk norma kooperatif yang menuntut semua wilayah, populasi, dan struktur sosial menikmati kebebasan berdemokrasi yang sama dalam siklus yang dinamis, baik secara langsung maupun melalui agen yayasan.

Kata kunci: Implementasi, Good Governance, Pelayanan.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Kumpulan individu yang dipilih melalui prosedur membentuk lembaga pemerintah. Mereka harus memenuhi tugas mereka untuk memberikan layanan publik terbaik. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai dengan memaksimalkan kekuatannya, terutama dalam hal menggarap sumber daya manusia (SDM). bekerja secara efisien dan efektif untuk mengubah cara administrasi publik dijalankan. Akan ada peningkatan manfaat administrasi atau kepuasan pelanggan bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk memberantas kejahatan. Ini adalah salah satu cara untuk menerapkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah harus diperhatikan dengan seksama dan seksama. Investigasi pelayanan publik sangat penting karena masyarakat biasanya merasa bahwa kehidupan dan pelayanan tidak dapat dipisahkan dan mereka sangat membutuhkan pelayanan publik yang baik. Administrasi area publik Indonesia telah tumbuh secara signifikan sebagai akibat dari globalisasi. Salah satu peningkatannya adalah beralih dari struktur terdesentralisasi yang menyediakan administrasi jarak jauh ke kerangka kerja yang direvisi yang melakukan sebaliknya. Perubahan sistematis memaksa pemerintah daerah berjuang untuk kemajuan. otonomi Pemerintah Daerah, yang dapat dicapai dengan kebijakan yang berorientasi pada desentralisasi. Karena itu, ini berisi standar penting untuk menciptakan tata kelola yang baik, kadang-kadang dikenal

sebagai "tata kelola yang baik", ditambah dengan peningkatan teknologi dan informasi. Tata kelola yang efektif ini menunjukkan bahwa tugas dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsekuensinya, penguasa dituntut untuk memberikan tugas publik yang lebih layak sebagai bentuk hiburan utama guna mewujudkan pemerintahan yang indah. Pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk mewujudkan good governance melalui organisasi seperti yang ada di Desa Sumber Brantas.

Menurut Perda Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Terbuka Besar, afiliasi daerah merupakan salah satu perhimpunan kekuatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan wilayah kelurahan. Mengingat tujuan utama organisasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, penyelenggaraan pelayanan masyarakat merupakan masalah yang sangat krusial bagi lembaga pendampingan masyarakat. Administrasi ini harus sempurna dan sempurna. Pelayanan publik disusun di sekitar tugas, tanggung jawab, dan tujuan untuk memuaskan keinginan publik akan produk dan layanan yang setara dengan barang publik. Otoritas publik diharuskan untuk menyediakan hak-hak dasar dan kebutuhan setiap penduduk dan penjajah (kebebasan pusat). Beberapa tuntutan lokal harus diperhatikan, dan kebutuhan masyarakat harus diperhatikan, agar pemerintahan tampak lebih baik. Kinerja (performance) adalah sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan tertentu menjalankan tujuan, sasaran, dan visi perusahaan. Skenario memiliki efek pada misi perusahaan. Dimulai dengan barang dan jasa publik, yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan ditawarkan oleh lembaganya sendiri, kata "jasa" mencakup semua bentuk jasa.

Sangat penting untuk strategi perubahan yang dimaksudkan untuk memahami kerangka pemerintahan yang sempurna, kompeten, dan sederhana. Dukungan, efektivitas, daya tahan, kekhasan legislasi, dan visi merupakan faktor penting dalam mengatur masalah. Dengan menerapkan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik, maka dapat tercipta sistem pelayanan publik yang transparan. Menurut Mohmad (2003), implementasi kebijakan kontemporer mengalami sejumlah kekurangan termasuk kurangnya daya tanggap, data, kejelasan, koordinasi, dan keinginan untuk mempertimbangkan preferensi, tujuan, dan sentimen masyarakat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, khususnya di Peminin Desa Sumber Brantas diharapkan dapat memenuhi sebagian besar tuntutan masyarakat akan terbentuknya sistem politik pemerintahan yang sesuai dengan kepentingannya dan pada umumnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Penulis menggunakan judul Mengenai "Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Meningk atkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Sumber Brantas"

#### 1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik Desa Sumber Brantas sebagai hasil penerapan prinsip-prinsip good governance?
- 2. Apa alasan yang mendorong dan menghambat penerapan prinsip good governance untuk meningkatkan standar pelayanan publik di Desa Sumber Brantas?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan mengembangkan lebih lanjut bagaimana praktik administrasi yang baik

diimplementasikan dalam sifat administrasi publik di Kota Sumber Brantas, Wilayah Bumiaji, Kota Batu, dan Wilayah Jawa Timur.

- Mempelajari bagaimana konsep good governance digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Sumber Brantas.
- Untuk mengetahui variabel apa saja yang membantu dan menghambat penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Sumber Brantas.

## 1.4. Manfaat penelitan

#### 1. Manfaat teoritis

- Hasil kajian dapat menjadi batu loncatan untuk penelitian selanjutnya khususnya Penerapan Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Sumber Brantas.
- Investigasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca dan mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan praktek administrasi yang baik dalam memahami perbaikan sifat administrasi publik di Kota Sumber Brantas.

## 2. Manfaat Praktis:

- Memberikan saran dan perubahan tentang bagaimana menerapkan aturan tata pemerintahan yang baik dengan lebih baik dalam prakarsa Desa Sumber Brantas untuk meningkatkan standar pelayanan publik.
- 2. Untuk berbagai ilmuwan, dapat menyertakan referensi dan bagian ulasan tentang penggunaan praktik administrasi yang baik saat bekerja pada sifat administrasi publik di Kota Sumber Brantas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harbani, Pasolong. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV. Alfabeta
- Moleong. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja: Rosdakarya Bandung
- Nuris, M, A.2020. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memejukan Kabupaten Jember. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember. Vol. 1{3}
- Putrii, K, D, Y. 2017. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Motivasi Dan Budaya Organisasi Kinerja Karyawan. Jurnal Akuntansi Universitas Undayana Vol. 21{2]
- Rohman, Abd Dan Hanif, S, Y. 2019 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Reformasi Unitri. Vol. 9{2]
- Sedarmayanti, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Meneliti Suatu Kondisi Objek Alamiah Bandung: Alfabeta CV
- Zullkarnain. 2002. *Kendala Terwujudnya Good Governance*". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Prinsip Pelayanan Publik